

Kontribusi Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pemilu Damai

Endang Ekowati¹, Muhammad Arif², Muhammad Syahwali³

Shela Myta wahyudi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan (20371), Provinsi Sumatra Utara, Indonesia

a.muahmmad2001@gmail.com²

ABSTRACT

The theoretical dominance of direct local election is mainly based on western theory of democracy, local politics and development. There are plenty western theories used to analyze current Indonesian local politics, including direct local election. In fact, however, the problems of local direct election still take place in many forms of disadvantages. These problems are, for instance, moneypolitics, riots, long conflicts, black campaigns and so forth. In order to minimize these problems, local wisdom based on Javanese values is important in contribution to solve the relevant problems. There are many Javanese value based local wisdom that may useful to be implemented.

Keywords: *local direct elections, local wisdom, Javanese values, local politics.*

ABSTRAK

Keunggulan teoretis pemilihan kepala daerah secara langsung didasarkan terutama pada teori-teori Barat tentang demokrasi, politik lokal, dan pembangunan. Banyak teori barat yang digunakan untuk menganalisis politik lokal saat ini di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun nyatanya, persoalan pemilu tetap ada dalam berbagai bentuk yang merugikan. Masalah-masalah ini termasuk kebijakan moneter, kerusuhan, konflik berkepanjangan, kampanye hitam, dll. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, kearifan yang dilandasi oleh nilai-nilai lokal Jawa merupakan kontribusi penting untuk memecahkan permasalahan terkait. Banyak kearifan lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai Jawa yang dapat bermanfaat untuk diterapkan.

Kata kunci : *pilkada, kearifan lokal, nilai kejawaan, politik lokal.*

PENDAHULUAN

Teori-teori tentang demokrasi dan pemilihan presiden daerah di Indonesia pada umumnya dan di negara bagian Jawa Tengah pada khususnya dipengaruhi dan didominasi oleh teori-teori Barat Sarjana Barat seperti Smith, Dennis Rondinelli, Sabir Cheema, Nick Devas dan sebagainya telah mengembangkan banyak tokoh atau ahli teori politik dan demokrasi lokal atau desentralisasi. Hal ini senada dengan pendapat Purwo Santoso.

Bahwa para sarjana Barat sering menganggap Indonesia sebagai tujuan penelitian yang sangat penting untuk menciptakan grand theory yang diakui dunia. Sebut saja, sarjana Barat seperti Clifford Geertz, Benedict Anderson, Harold Crouch, Colin Brown, Daniel S. Lev dll. Bahkan peraih Nobel Muhammad Yusuf dari Pakistan melakukan penelitian tentang sistem arisan di Kabupaten Batu Malang, yang dikembangkannya menjadi Gramene Bank. Hal itu justru menunjukkan bahwa kearifan lokal yang benar-benar hidup dan dimiliki Indonesia, tidak dipelajari dan

digunakan dalam persaingan masyarakat lokal. Kearifan lokal adalah kearifan lokal yang membentuk budaya lokal yang baik dan positif untuk dikembangkan guna mengatasi permasalahan masyarakat.

Desentralisasi dan Desentralisasi: Secara teoretis, pilkada yang merupakan salah satu pilar dari demokratisasi daerah berdampak signifikan terhadap upaya penerapan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di daerah. Diyakini bahwa desentralisasi menawarkan cara terbaik dan membawa berbagai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setidaknya mencakup beberapa poin kunci.

Pertama, desentralisasi merupakan sarana pendidikan politik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran debat politik dalam pemilihan pemimpin demokrasi lokal. Pilkada langsung sebagai sarana pendidikan politik memberikan contoh positif dan elegan bahwa semua pihak yang terlibat, terutama aktor utama seperti partai politik, kandidat, dll, harus terus dikembangkan. Realitas di lapangan bukanlah sesuatu yang tidak mudah dipahami. Namun, upaya positif harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, mengingat pentingnya menciptakan moral politik yang positif dalam implementasi kebijakan daerah.

Kedua, desentralisasi adalah pelatihan pemimpin politik, yang menghasilkan pemimpin politik yang mampu mengambil keputusan, menyelenggarakan konsultasi publik dan melakukan dimensi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Hal ini banyak dibuktikan di Amerika Serikat, yaitu cukup banyak presiden yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur negara bagian. Hal seperti itu memang perlu dikembangkan, karena pengalaman Indonesia melatih pemimpin politik pada posisi strategis tidak diketahui, apalagi ketika kepemimpinan politik dinaikkan dari lokal ke nasional. Meskipun lebih terasa di kantor lembaga perwakilan yang melatih kepemimpinan politik daripada di posisi kepemimpinan terkemuka.

Ketiga, melalui desentralisasi, stabilitas politik dapat dipertahankan melalui partisipasi luas melalui demokrasi lokal. Bahkan, kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat untuk menjaga dan memperkuat kerukunan sosial, semangat koherensi dan stabilitas politik. Premis dasarnya adalah semakin besar ruang partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung, semakin memenuhi kebutuhan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan pada semua tingkatan demokrasi.

Keempat, desentralisasi dapat mengarah pada kesetaraan politik melalui partisipasi politik yang lebih besar, yang mengurangi konsentrasi kekuasaan di lembaga-lembaga tertentu. Desentralisasi kekuasaan politik yang lebih besar untuk menguntungkan kaum miskin dan tertindas. Pada titik tertentu, justru menjadi pelajaran bahwa pemimpin tidak harus sombong dan orang tidak harus rendah hati. Inilah arti sebenarnya dari kesetaraan politik.

Kelima, desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat lokal terintegrasi dalam sistem desentralisasi, yang justru mendorong partisipasi masyarakat lokal, pelayanan publik yang lebih baik dan akses yang lebih baik terhadap pelayanan lokal. Terakhir, desentralisasi meningkatkan tanggung jawab administrasi karena anggota DPRD lebih mengetahui kebutuhan dan situasi daerah dan bagaimana mengelolanya secara efektif dan efisien. Penting untuk fokus memastikan bahwa anggota parlemen lokal terus fokus pada pemenuhan kebutuhan

rakyatnya. Pengalaman pahit selama ini, wakil daerah lebih mewakili kepentingannya ketimbang kepentingan masyarakat luas.

Pemilihan kepala daerah secara langsung, salah satu realisasi dari desentralisasi politik, seperti yang telah dilihat oleh para ahli Barat di atas, sebenarnya menunjukkan bahwa idealisme itu baik, positif dan sempurna. Pemilihan kepala daerah secara langsung mungkin memiliki efek positif yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi daerah yang dinilai banyak memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka percaya bahwa pemilukada dapat menimbulkan banyak efek positif, seperti meningkatkan partisipasi politik asli lokal (tidak semua), pemilihan pemimpin politik lokal yang demokratis, mengembangkan pasokan pemimpin yang memadai di tingkat nasional, mengembangkan politik lokal yang kuat. . budaya . untuk mendukung budaya politik nasional dan adanya keyakinan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah. Pilkada langsung memperkuat dan mengarah pada partisipasi politik yang nyata karena mereka benar-benar terlibat langsung dalam proses politik lokal, sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik lokal tersebut. Keterlibatan mereka menjadi sangat intens dan mendalam karena kepentingan mereka dapat tersalurkan secara langsung melalui keterlibatan politik tersebut. Karena cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang terbatas, lebih baik dan lebih aman untuk memilih kepemimpinan politik di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah langsung dalam situasi pasca-konflik, karena kepala daerah yang terpilih kemungkinan besar lebih tahu tentang isu-isu lokal. dalam wilayah perkotaan. Dengan kata lain, semakin eratnya hubungan antara rakyat dengan pimpinan daerah memungkinkan pelaksanaan proses pemilihan pimpinan politik menjadi lebih baik.

Mengembangkan suplai pemimpin melalui pemilukada dinilai cukup mampu mendukung kebutuhan pemimpin nasional. Jumlah pemimpin daerah yang sukses kemungkinan akan bertambah dan akan dibutuhkan untuk mengidentifikasi pemimpin potensial di tingkat nasional. Pemilukada yang sukses sangat mungkin akan melahirkan gubernur/walikota. Gubernur yang berhasil juga dapat mengajukan beberapa calon kepala negara, baik presiden, wakil presiden, maupun menteri. Menurut banyak pihak, pembentukan budaya politik lokal yang demokratis ditentukan oleh fakta bahwa salah satunya adalah pemilihan langsung pemerintah daerah pascakonflik yang baik dan demokratis. Dengan pemilukada langsung yang demokratis, sangat mungkin terbentuk perilaku dan orientasi politik lokal yang maju dan positif. Peningkatan kesejahteraan rakyat akan benar-benar terwujud manakala mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik dan peka yang bersimpati terhadap kebutuhan masyarakat dalam pemilukada. Paling-paling, pemilukada yang sukses menghasilkan pemimpin-pemimpin baik yang didukung dan dicintai rakyat.

Namun, jelas dari banyak cita-cita positif pemilukada di atas yang tidak serta merta dapat diwujudkan dalam konteks politik dan pemerintahan daerah saat ini. Yang terjadi justru sebaliknya, dengan kata lain efek negatif atau aspek buruk pemilukada mengambil alih praktik politik daerah. Fakta tersebut mungkin sejalan

dengan pemikiran Michael Mann bahwa demokrasi tidak selalu ideal karena memang mampu menciptakan apa yang disebutnya sisi gelap demokrasi. Sisi gelap demokrasi langsung dalam pemilukada langsung dapat dilihat setidaknya dari tingginya intensitas budaya transaksi politik (politik uang), relatif tingginya intensitas kampanye hitam, judi politik dengan bottoan (spekulasi politik). praktik. kuat, dan motivasi para pemimpin pencari kekayaan saja begitu besar sehingga banyak pemimpin yang lahir sebagai hasil pemilukada langsung menghadapi masalah korupsi yang akut. Transaksionalisme saat ini berkembang sangat pesat di hampir semua praktik pemilu langsung di Indonesia, khususnya pemilukada, pemilu presiden/militer dan juga pemilu parlemen. Banyak pihak berpendapat bahwa tidak mungkin menghapus budaya politik yang kuat yang telah mengakar dalam politik nasional dan lokal Indonesia. Kurangnya moral politik yang kuat dan keinginan untuk percaya bahwa penting untuk memenangkan pemilukada menciptakan kampanye hitam yang keras. Tujuan utamanya tentu saja untuk menumbangkan lawan-lawan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Salah satu cara cepat untuk mengalahkan kandidat yang kuat dan populer adalah melalui kampanye hitam, selain serangan terhadap kebijakan moneter. Desakan mencari kekayaan atau melunasi utang politik yang cukup besar akibat pemilukada membuat pemimpin cenderung menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dan uang sebanyak-banyaknya. Se jauh mungkin. Akibatnya, mereka melanggar mekanisme hukum dan hukum yang muncul dalam sistem sosial politik, sehingga mereka dicurigai atau dihukum dalam kasus korupsi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kajian penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh si peneliti untuk berinteraksi dan bertatap muka secara langsung dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian selama penelitian itu berlangsung. Dalam hal ini penulis sendiri mengambil informasi dari fakta demokrasi pemilu yang kita laksanakan saat ini. Pendekatan kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang mana hasil penemuannya tidak diperoleh baik itu dari rumus, statistik atau bisa disebut melalui hasil hitungan dalam angka, namun data yang dikumpulkan berdasarkan gambaran yang dilihat, didengar, juga berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini juga bersifat field reserch atau penelitian lapangan, yaitu salah satu metode pengumpulan dan pengolahan data yang didapatkan dari lapangan.

Menurut para ahli, Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau juga lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh si peneliti. Sedangkan Jane Richie, sejalan dengan definisi tersebut mengemukakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah sebuah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektif di dalam dunia dilihat dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menanggapi berbagai permasalahan terkait dengan praktik pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di atas, untuk memperbaiki situasi dan keadaan politik lokal yang semakin carut marut, salah satu solusi yang diajukan adalah dengan mencoba menerapkan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan keadaan masing-masing negara. . dalam pelaksanaan pemilukada langsung pascakonflik.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, tata krama atau aturan-aturan khusus yang mengandung nilai-nilai kearifan untuk mengatur kehidupan sosial suatu masyarakat untuk mencapai kebaikan atau keharmonisan sosial. Kearifan lokal berasal dari kata loka (lokal atau daerah tertentu) dan wisdom (kearifan atau kebijaksanaan). Prof. Nyoman Sirtha mencatat bahwa kearifan lokal memiliki beberapa fungsi dan makna, yaitu:

1. Pekerjaan untuk pelestarian dan konservasi sumber daya alam
2. Pekerjaan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya dalam kaitannya dengan upacara daur hidup, konsep.
3. Karya untuk pengembangan budaya dan pengetahuan seperti upacara Saraswati.. Bertindak sebagai nasihat, kepercayaan, sastra dan tabu
5. Memiliki makna sosial, mis. dalam upacara bergilir pertanian
6. Memiliki makna etis dan moral.
7. Memiliki arti politis, seperti dalam hubungan kekuasaan antara patron dan klien.

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, setiap daerah memiliki banyak nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan secara positif dan efektif untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemilukada. Setiap daerah harus memiliki keragaman budaya lokal yang baik dan positif untuk menghadapi isu-isu publik, termasuk pemilukada. Dalam konteks Jawa Tengah, nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk mengatasi persoalan negatif pemilukada langsung adalah sebagai berikut.

1. *Yen hanya menang, yen hanya kalah salad.* Soalnya, kalau menang jangan sombong, sombong, dan kalau kalah jangan marah dan merusak. Kearifan lokal yang dilandasi nilai-nilai Jawa tersebut sebenarnya sangat positif dan mendukung berbagai upaya positif untuk menjaga suasana kondusif dan mencegah konflik pasca pilkada. Jika partai-partai politik yang bersaing dapat menjaga diri dan saling menghormati, sebagaimana disebutkan di atas, suasana kondusif dan stabilitas politik akan terjaga dalam proses pemilukada segera. Sikap tidak sombong dan mudah marah merupakan nilai-nilai inti Jawa yang penting dan mendasar untuk memperbaiki perilaku kisruh pemilu saat ini.
2. *Jer basuki mawa bea.* Inti dari kearifan lokal Jawa ini adalah kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Tanggung jawab dalam konteks ini adalah modal atau pengorbanan, yang tidak berarti hanya uang, tetapi dapat berupa modal material, modal kerja (usaha), pengorbanan, dll. Kandidat yang menang karena tak kenal lelah melakukan silaturahmi ke berbagai kalangan dari pagi hingga larut malam sebenarnya punya kewajiban. Kepabeanan juga dapat diartikan sebagai modal awal atau investasi awal. Nilai kearifan lokal di balik itu, yang sangat

penting untuk memenangkan pilkada setelah konflik langsung, adalah calon harus mencari untung, bekerja keras, berkorban untuk masyarakat. Ini menunjukkan sikap yang tidak langsung. Artinya pembalap yang menang adalah pembalap yang lengkap, bukan pembalap instan yang juga langsung menang. Kemungkinan langsungnya adalah, misalnya, membeli suara atau kampanye hitam.

3. *Ana rembug dirembug* Prinsip untuk memahami makna kearifan lokal adalah bahwa semua masalah sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi politik yang baik. *Ana rembug dirembug*, artinya perenungan, dialog atau diskusi untuk menemukan pengertian. Pentingnya kearifan lokal berbasis Jawa sangat baik dan positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait pemilihan langsung pemerintah daerah pascakonflik. Dalam kompetisi politik yang ketat, kesalahpahaman kemungkinan besar akan terjadi. Melalui komunikasi, diskusi dan debat, pemahaman sebenarnya dapat dicapai sehingga masalah dapat diselesaikan.
4. Menang tanpa merayakan. Arti sebenarnya dari kearifan lokal adalah menang, tetapi tidak menang. Makna utamanya adalah sebagai konsep "*win-win solution*". Artinya, ketika kompetisi usai, semua pihak harus siap kalah dan menang. Artinya yang kalah tidak merasa kalah, yang menang tidak merasa dirinya yang terbaik, yang terbaik. Nilai kearifan lokal ini sangat baik dan urgen untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait perebutan jabatan publik melalui pemilihan langsung pemerintah daerah pascakonflik.
5. Pemimpin yang dapat mengayomi dan mengasuhnya bergantung pada sifat *Asthabrata*, berbudi luhur dan bertindak sebagai satu kesatuan. Dibalik kearifan lokal tersebut terdapat kearifan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengayomi, membuat rakyatnya tenang, damai dan tenteram, ia harus memiliki karakter *asthobrat* yang berbudi luhur, paham dengan baik dan dapat melaksanakan dengan baik. Pendidikan politik Jawa sangat penting, apalagi ketika masyarakat dihadapkan pada kriteria memilih pemimpin.

Karakter *Asthabrata* mengajarkan sifat-sifat seorang pemimpin sehingga pemimpin dapat meneladani karakter seperti:

- Pertama, bumi. Seorang pemimpin harus seperti bumi, yaitu tempat berlindung, pemberi dermawan dan sumber kehidupan bagi para pengikutnya.
- Kedua, angin. Dengan kata lain, pemimpin harus kuat, rendah hati, mampu selalu melihat setiap persoalan, dan berani mempresentasikan kepentingan masyarakat.
- Ketiga, lautan. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus memiliki visi yang luas, visi yang luas, hati yang luas seluas lautan, tidak mudah tersinggung kritik, tidak puas dengan sanjungan, mampu menyesuaikan diri dengan semua keinginan orang dan kelompok apapun, dan pemaaf.
- Keempat, bulan. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus lemah lembut, baik hati, sabar, selalu rendah hati dan berbudi luhur serta menyebarkan suasana damai di masyarakat.
- Kelima, matahari. Dengan kata lain, pemimpin harus mampu mencerahkan orang, berhati-hati, bertindak seperti jalur matahari, yang tidak terburu-buru, tetapi pasti memberikan sinar cahaya tanpa belas kasihan kepada semua makhluk.

- Keenam, surga. Dengan kata lain, pemimpin harus berwibawa dan mengintimidasi siapa saja yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan.
- Ketujuh, api. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus berani bertindak tegas terhadap siapapun tanpa berpihak pada kebenaran dan keadilan.
- Kedelapan, bintang. Artinya pemimpin harus menjadi sumber panutan, budaya dan perilaku yang baik. Anda memiliki keinginan yang tinggi untuk sukses nasional, tidak mudah dipengaruhi, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Dra. Endang Ekowati MA selaku dosen pembimbing magang kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, D. 2012, Fenomena Jokowi dan Money Politics dalam Pilkada dalam Kompas, Kompasiana.com/post/politik/2012/09/18/fenomena. 18 September 2012.
- Mann, M. 2004, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
- Peters, B.G. 1996, *The Future of Governing: Four Emerging Models*, University of Kansas, Kansas, USA
- Robertson, D. 2000, *Dictionary of Politics*, Penguin Books, London
- Rondinelli, JR Nellis & G Shabbir Cheema 1983, *Decentralization in Developing Countries*, World Bank, Washington DC
- Santoso, P. 2011, *Ilmu Sosial Transformatif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Yogyakarta*.
- Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati dalam *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37 No. 2., hlmn 111-119.
- Smith T.M. 1990, *Decentralisation, Tradition and Change in Indonesia*, Transaction Publishers, New Brunswick, USA.
- Turner M. & Hulme D. 1997, *Governance, Administration and Development*, Kumarian Press, University of Michigan, USA.